

Nomor Surat	055/CORSEC/PTP/IV/2026
Nama Perusahaan	PT Perintis Trinitis Properti Tbk
Kode Emiten	TRIN
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG

Perseroan Menyampaikan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Ya)

Perseroan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 19 Mei 2026

Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link <https://trinitiland.com/> pada tanggal 19 Mei 2026

Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)

A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)

Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :

E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
Laporan Emisi GRK Konsolidasi?	Ya
Batasan Organisasi	Operasional/Finansial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini?	Tidak

Name	Total Emisi (tCO ₂ e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan	
Emisi langsung dari pembakaran stasioner	0
Emisi langsung dari pembakaran bergerak	282.787
Emisi langsung dari proses pengolahan	0
Emisi fugitive langsung	0
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Emisi Langsung (Scope 1)	282.787

Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli

Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli	132,45
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik)	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2)	132,45

Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi

Transportasi dan distribusi hulu	0
Perjalanan dinas	0
Transportasi dari klien dan pengunjung	0
Transportasi dan distribusi hilir	0
Perjalanan Karyawan	0

Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan

Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung	0
Pembelian Barang dan Jasa	0
Capital equipment/goods	0
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional	0
Aset Sewaan hulu	0

Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan

Investasi	0
Penggunaan produk yang dijual	0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual	0
Waralaba hilir	0
Aset Sewaan Hilir	0
Pengolahan produk yang dijual	0

Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya	
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3)	0
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)	415.237
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)	0
Offsets/Credits	0
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh)	0

E-02	Intensitas Emisi GRK	Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat	2,2
E-03	Konsumsi Energi listrik	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J)	332,69
		Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J))	0
		Total konsumsi energi (kWh or J)	1.199,64
E-04	Konsumsi Air	Total konsumsi air (m3)	8.584
E-05	Limbah yang dihasilkan	Total limbah yang dihasilkan (ton)	33,86

E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero?	Tidak
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi?	null
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen pencapaian target Net zero emission Perusahaan.	
-	

E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi?	Tidak
Target pengurangan emisi GRK	0 %
	0 (tCO ₂ e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK?	null

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?

Ya

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Untuk menekan emisi yang timbul dari operasional, Perseroan mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi energi di kantor pusat maupun di area proyek. Seluruh lampu di President Office Jakarta dan Head Office Tangerang telah diganti dengan lampu hemat energi guna menurunkan konsumsi listrik serta mengurangi emisi tidak langsung dari penggunaan listrik. Selain itu, Perseroan menjadi salah satu pengembang yang menyediakan fasilitas charging station untuk kendaraan listrik di kawasan Brooklyn dan berencana memperluas penerapan fasilitas ini ke proyek-proyek selanjutnya. Inisiatif ini menjadi langkah awal mendorong penggunaan energi yang lebih bersih serta mendukung pergeseran menuju mobilitas rendah emisi di lingkungan proyek Perseroan.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Kesetaraan Gender

Level Jabatan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah pegawai	Persentasi pegawai	Jumlah pegawai	Persentasi pegawai
Entry-level	54	60 %	42	59,15 %
Mid-level	18	20 %	17	23,94 %
Senior-level	14	15,56 %	12	16,9 %
Executive-level	4	4,44 %	0	0 %
Total Pegawai	90	100 %	71	100 %

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur

Rentang Usia (tahun)	Level Jabatan								Jumlah Pegawai
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
18-25	1	0	2	0	4	2	1	0	10
25-35	12	1	2	1	6	3	0	0	25
35-45	16	11	9	8	4	3	3	0	54
45-55	25	29	5	8	0	4	0	0	71
>55	0	1	0	0	0	0	0	0	1

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja	41 Pegawai	25 %
Jumlah Pegawai Baru/pengganti	26 Pegawai	16 %

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
--	--	--

Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	58 Pegawai	36,02 %
--	------------	---------

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%)
0,24 jam/pegawai	155	96,44 %

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
0	0 %

S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan	0
--	---

Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja

S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi?	Ya
Selain perlindungan dari risiko fisik, Perseroan juga memastikan bahwa seluruh karyawan terlindungi dari potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif, dan pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja. Perseroan menerapkan kebijakan larangan diskriminasi, kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan yang selaras dengan ketentuan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran HAM, tindakan diskriminasi, maupun kejadian kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan Perseroan.	
S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?	Ya
Selain perlindungan dari risiko fisik, Perseroan juga memastikan bahwa seluruh karyawan terlindungi dari potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif, dan pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja. Perseroan menerapkan kebijakan larangan diskriminasi, kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan yang selaras dengan ketentuan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran HAM, tindakan diskriminasi, maupun kejadian kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan Perseroan.	
S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?	Ya
Dalam hal perlindungan tenaga kerja, Perseroan memiliki kebijakan Pekerja Anak dan Pekerja Paksa yang mengacu pada pedoman International Labor Organization (ILO). Kebijakan ini diperkuat dengan mekanisme verifikasi usia calon pekerja pada setiap proses rekrutmen, sehingga Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur maupun praktik kerja paksa di seluruh lini usaha. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi kontribusi Perseroan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.	

S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?	Ya
Perseroan berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan mendukung produktivitas seluruh karyawan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kerja yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman, ruang menyusui, area hijau terbuka, serta infrastruktur keselamatan yang lengkap termasuk prosedur evakuasi darurat untuk kondisi seperti kebakaran dan gempa. Pada tahun 2025, tidak terdapat kecelakaan kerja yang tercatat di lingkungan kantor pusat maupun unit operasional Perseroan dan entitas anak. Kondisi ini mencerminkan efektivitas penerapan prosedur keselamatan kerja dan pemantauan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan.	

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?	Ya
Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang selaras dengan SDGs. Program-program tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan sosial, serta dukungan terhadap kelompok rentan di sekitar area operasional Perseroan. Kegiatan CSR dilaksanakan melalui bantuan sosial, program peningkatan fasilitas umum, dukungan kesehatan dan pendidikan, serta partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Seluruh inisiatif ini dirancang untuk memberikan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memperkuat hubungan Perseroan dengan komunitas di sekitar proyek.	

C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)

Tipe Manajemen Perusahaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Pihak Independen
Komisaris	0	3	1	1
Direksi	0	4	0	0

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan

	Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan)	Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan	49	75,5 %
Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan	8	78,25 %

Kebijakan mengenai manajemen lainnya

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?	Ya
Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi, sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan Direksi atau Chief Executive Officer, sedangkan Ketua Dewan Komisaris memimpin pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Struktur ini sejalan dengan ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia yang menerapkan sistem dua dewan atau two tier system.	
G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris	Ya

Kinerja Dewan Komisaris dinilai melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Proses evaluasi ini berlandaskan mandat yang diberikan Pemegang Saham, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta Anggaran Dasar Perseroan. Sejak awal masa jabatan, kriteria penilaian disampaikan secara jelas kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan tugas dapat diukur secara objektif. RUPS menetapkan parameter penilaian kinerja Dewan Komisaris maupun individual anggotanya. Aspek yang menjadi kriteria evaluasi antara lain:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan.
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

Kinerja Direksi dinilai berdasarkan target dan indikator yang tercantum dalam perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Appointment Agreement). Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh RUPS untuk memastikan bahwa Direksi menjalankan mandat secara efektif dan sejalan dengan tujuan Perseroan. Hasil penilaian individu menjadi dasar pertimbangan Pemegang Saham dalam proses pengangkatan kembali. Selain itu, hasil evaluasi tahunan terhadap Direksi, baik secara kolektif maupun individual, digunakan sebagai bagian dari penyusunan skema remunerasi Direksi.

G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris

Tidak

Perseroan mendukung pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris melalui berbagai program peningkatan kapabilitas, termasuk pelatihan, sertifikasi profesional, seminar maupun workshop yang relevan dengan peran dan fungsinya. Fasilitas ini diberikan agar Dewan Komisaris dapat terus mengikuti perkembangan regulasi, industri dan praktik tata kelola yang baik.

G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris

Ya

Prosedur nominasi Perseroan, yang memuat kebijakan serta langkah-langkah dalam proses penunjukan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris;
3. Membantu melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?

Ya

Perseroan menetapkan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Insan Trinita Land dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik ini menjadi acuan dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta keselarasan antara tindakan individu dan nilai-nilai yang dianut Perseroan, termasuk dalam komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik.

Perseroan juga menerapkan kebijakan anti korupsi secara tegas sebagai bagian dari komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perseroan melarang setiap bentuk praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, perekonomian, maupun Perseroan, termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, gratifikasi yang tidak sah, serta tindakan kecurangan lainnya. Dalam pelaksanaannya, setiap individu atau pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum, kebijakan internal, atau standar etika untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dan yang dapat merugikan Perseroan, akan dikenakan tindakan disiplin dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku bagi seluruh karyawan, mitra kerja, serta instansi pemerintah yang memiliki hubungan kerja dengan Perseroan. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan memahami standar perilaku yang diharapkan dan berkomitmen menjaga integritas dalam setiap aktivitas.

G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?

Ya

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dinyatakan sah dan mengikat apabila kuorum kehadiran terpenuhi. Kuorum kehadiran ditetapkan sebesar 1/2 dari seluruh saham dengan hak suara untuk RUPS Tahunan, serta 2/3 untuk RUPS Luar Biasa. Selain itu, Perseroan mewajibkan seluruh Insan Trinitas Land untuk tidak melakukan penyalahgunaan informasi material yang belum tersedia untuk publik dalam bentuk apa pun, termasuk untuk kepentingan transaksi atas efek Perseroan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Kode Etik, yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi internal serta larangan memanfaatkan akses informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain. Dengan ketentuan ini, Perseroan memastikan setiap tindakan dan transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor kepatuhan pasar modal.

G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?

Ya

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi dapat menghadapi situasi benturan kepentingan, yaitu kondisi ketika kepentingan ekonomis Perseroan berpotensi bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota organ tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini, Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib senantiasa:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi kondisi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

D. Lain-lain

Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG

Kinerja	Kode	Nama Metrik	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan
Lingkungan	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca	233
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	233
	E-03	Konsumsi Energi Listrik	232
	E-04	Konsumsi Air	233-234
	E-05	Limbah yang Dihasilkan	235
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission	233
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca	232-233
Sosial	S-01	Kesetaraan Gender	88-90
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur	91
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai	94
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara	92
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	95
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja	98
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	98,238
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi	98
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia	98,238
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa	97,238
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan	98
	S-12	Pencegahan Konflik Kepentingan	239,243

Tata-kelola	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi	160-161
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan	170
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO	130
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris	171
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris	145
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan	172
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi	202,205
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham	130,205
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan	163

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga

Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan

☒ Ya ☐ Tidak

☒ GRI

☐ TCFD

☐ CDP

☐ IFRS S1

☐ IFRS S2

☐ SASB

☐ Others, please specify

Assurance dan validasi pihak ketiga

☒ Tidak

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Perintis Trinita Properti Tbk

Citra Chandrika G. Putri

Corporate Secretary

PT Perintis Trinitis Properti Tbk

Brooklyn Premium Office JL Sutera Boulevard Kav 22-26 Alam Sutera, Tangerang

Telepon : 021 30066688, Fax : 021 80821403, www.trinitiland.com

Nama Pengirim	Citra Chandrika G. Putri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	01-05-2026 21:53
Lampiran	1. AR TRIN 2025 FIINAL.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perintis Trinitis Properti Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perintis Trinitis Properti Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	055/CORSEC/PTP/IV/2026
Issuer Name	PT Perintis Trinitis Properti Tbk
Issuer Code	TRIN
Attachment	1
Subject	Submission of Annual And Sustainability Report

The Company hereby submit Annual And Sustainability Report Report 2025 for the period of 01 Januari 2025 to 31 Desember 2025 in Indonesia dan Inggris

Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes)

The Company made invitations to the Annual General Meeting of Shareholders on 19 Mei 2026

The information referred above has been published on the Company's website <https://trinitiland.com/> at 19 Mei 2026

Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)

A. Environmental Performance

The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:

E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report	
Consolidated GHG Emission Report?	Yes
Organizational Boundaries	Operasional/Finansial
Any subsidiaries that are not included in the report?	No

Name	Total emission (tCO2e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	
Direct emissions from stationary combustion	0
Direct emissions from mobile combustion	282.787
Direct emissions from processes	0
Direct fugitive emissions	0
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Direct Emissions (Scope 1)	282.787
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	

Indirect emissions from imported/purchased electricity consumption	132,45
Indirect emissions from imported/purchased network energy consumption (excluding electricity)	0
Total Indirect Emissions (Scope 2)	132,45
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation	
Upstream transport and distribution	0
Business travels	0
Transportation of clients and visitors	0
Downstream transportation and distribution	0
Employee commuting	0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization	
Energy related activities not included in direct emissions and energy indirect emissions	0
Purchased goods and services	0
Capital equipment/goods	0
Waste generated in operations	0
Upstream leased assets	0
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization	
Investments	0
Use of sold products	0
End of life treatment of sold products	0
Downstream franchises	0
Downstream leased assets	0
Processing of sold products	0
Category 6: Indirect GHG emissions from other sources	

Other indirect emissions or removals	0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	415.237
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3)	0
Offsets/Credits	0
REC Purchases (kWh)	0

E-02	GHG Emissions Intensity	Total scope 1 and 2 emissions produced per revenue of listed compant (tCO2e/Rp)	2,2
E-03	Electricity Consumption	Total amount of energy directly consumed (kWh or J)	332,69
		Total amount of energy indirectly consumed (kWh or J)	0
		Total energy consumption (kWh or J)	1.199,64
E-04	Water Consumption	Total water consumed (m3)	8.584
E-05	Waste Generation	Total waste generated (ton)	33,86

E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target	
Does the Company have a net zero emission target commitment?	No
What year is the Company's net zero emission published target?	null
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company's commitment in achieving net zero emission target.	
-	

E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target	
Does the Company commit to reducing GHG emission?	Tidak
What is the Company's GHG emission reduction target?	0 %
	0 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target?	null

Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?

Yes

Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year

To reduce emissions from operations, the Company has begun implementing energy-efficiency measures at its head office and in project areas. All lights in the President Office in Jakarta and the Head Office in Tangerang have been replaced with energy efficient lamps to reduce electricity consumption and reduce indirect emissions from electricity use. In addition, the Company is one of the developers providing charging stations for electric vehicles in the Brooklyn area and plans to expand this facility to the next projects. This initiative is the initial step in encouraging the use of cleaner energy and supporting the shift towards low emission mobility in the Companys project areas.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Gender Diversity

Job positions	Men		Women	
	Number of employees	Percentage of employees	Number of employees	Percentage of employees
Entry-level	54	60 %	42	59,15 %
Mid-level	18	20 %	17	23,94 %
Senior-level	14	15,56 %	12	16,9 %
Executive-level	4	4,44 %	0	0 %
Total Pegawai	90	100 %	71	100 %

S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Age group (years)	Job levels								Number of employees
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	
18-25	1	0	2	0	4	2	1	0	10
25-35	12	1	2	1	6	3	0	0	25
35-45	16	11	9	8	4	3	3	0	54
45-55	25	29	5	8	0	4	0	0	71
>55	0	1	0	0	0	0	0	0	1

S-03 Employees Turnover

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Number of employees resigned	41 Employees	25 %
Number of newly appointed Employees	26 Employees	16 %

S-04 Temporary Worker

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Total company headcount held by contractors and/or consultants	58 Employees	36,02 %

S-05 Employee Training and Development

Average training hour per employee (in reporting year)	Total employee attending company training program	Percentage of employee attending company training program (%)
0,24 hours/employee	155	96,44 %

S-06 Injury Rate

Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees (%)
0	0 %

S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse

Number of incidents regarding human rights abuse (in reporting year)	0
--	---

Company Policy Regarding Employees

S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or non-discrimination?	Yes
In addition to protecting against physical risks, the Company ensures that all employees are protected from potential human rights violations, discriminatory actions, and sexual harassment or violence within the workplace. The Company implements a policy prohibiting discrimination, a policy to prevent and handle sexual violence, and a reporting mechanism that aligns with the provisions of the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 concerning Guidelines for the Prevention and Handling of Sexual Violence within the Workplace. Throughout 2025, there were no reports of human rights violations, acts of discrimination, or incidents of sexual violence or harassment within the Company.	
S-09 Does the company has a policy regarding human rights?	Yes
In addition to protecting against physical risks, the Company ensures that all employees are protected from potential human rights violations, discriminatory actions, and sexual harassment or violence within the workplace. The Company implements a policy prohibiting discrimination, a policy to prevent and handle sexual violence, and a reporting mechanism that aligns with the provisions of the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 concerning Guidelines for the Prevention and Handling of Sexual Violence within the Workplace. Throughout 2025, there were no reports of human rights violations, acts of discrimination, or incidents of sexual violence or harassment within the Company.	
S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced labor?	Yes
In terms of labor protection, the Company establishes a Child Labor and Forced Labor policy that adheres to International Labor Organization (ILO) guidelines. This policy is reinforced by a mechanism for verifying prospective employees ages during each recruitment process, ensuring that the Company does not employ underage employees or engage in forced labor across all lines of business. This policy also serves as the Companys contribution to achieving Sustainable Development Goal 8 on Decent Work and Economic Growth	
S-11 Does the company have a company policy regarding occupational health and safety as well as a safe working environment for all employees?	Yes
The Company is committed to fostering a decent, safe, and productive work environment for all employees. This effort is demonstrated by providing adequate work facilities, including comfortable workspaces, nursing rooms, green open spaces, and complete safety infrastructure, including emergency evacuation procedures	

for situations such as fire and earthquakes. In 2025, there were no work-related accidents reported at the Companys head office, operational units, or subsidiaries. This reflects the effectiveness of occupational safety procedures and ongoing risk monitoring.

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to the community or registered non-profit organizations?	Yes
Throughout 2025, the Company carried out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities aligned with the SDGs. These programs focused on meeting community needs, improving the quality of the social environment, and supporting vulnerable groups around the Companys operational areas. CSR activities are carried out through social assistance, public facility improvement programs, health and education support, and participation in community activities. All of these initiatives aim to deliver sustainable value to the community and strengthen the Companys relationship with the communities surrounding its projects.	

C. Governance Performance

G-01 Board Diversity and Independence

Type of Company Board	Number of seats on Company	Seats Occupied by Men	Seats Occupied by Women	Seats Occupied by Independent Party
Commissioners	0	3	1	1
Directors	0	4	0	0

G-02 Board Meeting Attendance

	Number of board meetings (in reporting year)	Percentage of board meeting attendances (in reporting year)
Director Attendance to Board Meetings	49	75,5 %
Comissioner Attendance to Board Meetings	8	78,25 %

Other governmental-related policy

G-03 Does the company has a policy regarding separation of the Chairman of the Board and CEO?	Yes
The Board of Directors carries out the Companys management, and its oversight is carried out by the Board of Commissioners. The President Director serves as the Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer, and the Chairman of the Board of Commissioners leads the implementation of the oversight function by the Board of Commissioners. This structure aligns with the provisions of Limited Liability Companies in Indonesia, which implement a two-tier system.	
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal?	Yes
The performance of the Board of Commissioners is assessed annually by shareholders through the General Meeting of Shareholders. This evaluation process is based on the mandate granted by the shareholders, provisions of laws and regulations, and the Companys Articles of Association. From the beginning of the term of office, the assessment criteria are clearly conveyed to the Board of Commissioners, enabling the implementation of their duties to be evaluated objectively. The GMS establishes parameters for evaluating the performance of the Board of Commissioners and its individual members. The evaluation criteria include: 1. Attendance rate at the Board of Commissioners Meetings and meetings with existing committees. 2. Its contribution to the Companys supervision process. 3. Its involvement in certain assignments.	

4. Its commitment to advancing the interests of the Company. The Board of Directors performance is assessed based on the targets and indicators outlined in the Appointment Agreement of Members of the Board of Directors. Evaluations are conducted annually by the GMS to ensure that the Board of Directors effectively carries out its mandate and remains in line with the Companys objectives. The results of individual assessments serve as the basis for Shareholder considerations in the reappointment process. Furthermore, the results of annual evaluations of the Board of Directors, both collectively and individually, are used in preparing the Board of Directors remuneration scheme.	
G-05 Does the company has a policy regarding board training and development?	No
The Company supports the competency development of members of the Board of Commissioners through various capability enhancement programs, including training, professional certification, seminars, and workshops relevant to their roles and functions. These facilities aim to enable the Board of Commissioners to keep abreast of developments in regulations, the industry, and good governance practices.	
G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and re-election?	Yes
The Companys nomination procedure, which contains policies and steps in the process of appointing members of the Board of Commissioners and Board of Directors, is carried out through the following stages: 1. Develop the composition and nomination process for members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners; 2. Develop policies and criteria required for the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and or Board of Commissioners; 3. Assist in evaluating the performance of members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners; 4. Develop a capacity building program for members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners; 5. Review and propose candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.	
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-corruption?	Yes
The Company has established a Code of Conduct as a behavioral guideline for all Trinita Land employees in carrying out their duties and interacting with stakeholders. This Code of Conduct serves as a reference for maintaining integrity, professionalism, and alignment between individual actions and the Companys values, including in communication and delivery of information to the public. The Company implements a strict anti corruption policy as part of its commitment to comply with laws and regulations and support the governments efforts to eradicate corruption. The Company prohibits any form of practice that could harm the state, the economy, or the Company, including abuse of authority, bribery, illegal gratuities, and other fraudulent acts. In its practice, any individual or party who intentionally violates legal provisions, internal policies, or ethical standards to obtain personal or group benefits that may be detrimental to the Company will be subject to disciplinary action and sanctions in accordance with applicable provisions. As part of its support for corruption eradication efforts in Indonesia, the Company has established an Anti Corruption Policy that applies to all employees, business partners, and government agencies that cooperate with the Company. This policy aims to ensure that all parties interacting with the Company understand the expected standards of conduct and are committed to maintaining integrity in all activities.	
G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of shareholders?	Yes
In accordance with the Companys Articles of Association, GMS resolutions are valid and binding if the attendance quorum is met. The attendance quorum is determined at 1/2 of all shares with voting rights for the Annual GMS and 2/3 for the Extraordinary GMS. In addition, the Company requires all Trinita Land employees not to misuse material information that is not yet publicly available in any form, including for transactions in the Companys securities. This commitment is affirmed through the Code of Conduct, which stipulates the obligation to maintain the confidentiality of internal information and prohibits the use of access to information for personal gain or to benefit others. With these provisions, the Company ensures that all	

actions and transactions remain compliant with the capital market provisions.	
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of directors/commissioners to prevent conflicts of interest?	Yes
In carrying out their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors may encounter situations of conflict of interest, namely conditions in which the Companys economic interests may conflict with the personal interests of the members of these bodies. To anticipate this issue, the Companys Articles of Association stipulate that members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must always: 1. Prioritize the interests of the Company and not reduce the Companys financial condition in the event of a conflict of interest. 2. Avoid making decisions in situations and conditions of conflict of interest. 3. Disclose family relations, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other Members of the Board of Commissioners and or members of the Board of Directors and or controlling shareholders of the Company and/or other parties in the framework of the Companys business. 4. Disclosure in decision-making must still be made even in the presence of a conflict of interest.	

D. Other

Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics

Kinerja	Kode	Metric Name	Pages in the Sustainability/Annual Report
Environment	E-01	Greenhouse Gas Emission Report	233
	E-02	Greenhouse Gas Emission Intensity	233
	E-03	Electricity Consumption	232
	E-04	Water Consumption	233-234
	E-05	Waste Generated	235
	E-06	Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	233
	E-07	Company Commitment to Reduce Emission	232-233
Social	S-01	Gender Equality	88-90
	S-02	Employees by Gender and Age Group	91
	S-03	Employee Turnover Rate	94
	S-04	Number of Temporary Officers	92
	S-05	Employee Training and Development	95
	S-06	Number of Work Accidents	98
	S-07	Human Rights Violation Incidents	98,238
	S-08	Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	98
	S-09	Policy on Human Rights	98,238
	S-10	Child Labor and/or Forced Labor Policy	97,238
	S-11	Occupational Health and Safety Policy and Safe and Secure Work Environment are provided to all employees.	98
	S-12	Corporate Social Responsibility	239,243

Governance	G-01	Management Diversity and Independence	160-161
	G-02	Total Attendance of Directors and Commissioners to Board Meetings	170
	G-03	Chairman of the Board and CEO Separation Policy	130
	G-04	Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	171
	G-05	Board of Directors and Commissioners Training Policy	145
	G-06	Special Criteria for Election of the Board	172
	G-07	Code of Ethics and/or Anti-Corruption	202,205
	G-08	Fair Treatment Policy for Shareholders	130,205
	G-09	Conflict of Interest Prevention Policy	163

Referenced International Standards and Third Party Verification

Alignment with sustainability reporting framework ☒ Yes ☐ No ☒ GRI ☐ TCFD ☐ CDP ☐ IFRS S1 ☐ IFRS S2 ☐ SASB ☐ Others, please specify
null
Third-party assurance and/or validation ☒ No

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Perintis Trinita Properti Tbk

Citra Chandrika G. Putri

Corporate Secretary

PT Perintis Trinitis Properti Tbk

Brooklyn Premium Office JL Sutera Boulevard Kav 22-26 Alam Sutera, Tangerang

Phone : 021 30066688, Fax : 021 80821403, www.trinitiland.com

Sender Name	Citra Chandrika G. Putri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	01-05-2026 21:53
Attachment	1. AR TRIN 2025 FIINAL.pdf

This is an official document of PT Perintis Trinitis Properti Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Perintis Trinitis Properti Tbk is fully responsible for the information contained within this document.